



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penggunaan analisis semiotika memang sudah banyak sekali digunakan dalam beberapa penelitian. Analisis semiotika dari Charles Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure hingga Roland Barthes acap kali diterapkan dalam menyelesaikan suatu kajian penelitian semiotika. Sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, maka dicantumkanlah beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Agil Pribadi, asal Universitas Pembangunan Nasional yang membahas mengenai pemaknaan karikatur pada *Harian Kompas* dengan objek penelitian adalah karikatur dari kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan.

Dalam penelitian milik Dimas Agil Pribadi ini, Dimas Agil Pribadi menjadikan surat kabar *Kompas* sebagai salah satu objek penelitian dikarenakan ketertarikan Dimas Agil Pribadi dengan idealisme *Kompas* yang memiliki visi “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Dimas Agil Pribadi menilai bahwa media *Kompas* menjadi salah satu saluran komunikasi politik di Indonesia. Pemilihan gambar karikatur pada *Harian Kompas* yang bertema *Kontroversi Kasus Mafia Pajak Gayus Halomoan Tambunan* sebagai objek penelitian karena gambar karikaturnya yang unik, karena apa yang disajikan dalam gambar karikatur editorial tersebut seakan-akan menggambarkan tanggapan permasalahan yang terjadi dalam sudut

pandang masyarakat Indonesia yang diwakili oleh kartunis. Dalam mengungkapkan makna pesan gambar karikatur tersebut, Dimas Agil Pribadi menggunakan pendekatan Semiotika Charles, yaitu studi mengenai tanda dan segala yang berhubungan dengan acuannya.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Dimas Agil Pribadi merupakan suatu kajian penelitian kualitatif tentang tanda verbal dan non verbal dalam merepresentasikan kasus mafia pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dalam bentuk karikatur. Secara keseluruhan penelitian ini berhasil karena dari hasil analisisnya, Dimas Agil Pribadi mampu menjelaskan makna dari tanda-tanda dalam karikatur yang terdapat pada *Harian Kompas*.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian milik Dimas Agil Pribadi terdapat pada objek penelitiannya, dalam penelitian milik Dimas Agil Pribadi, Dimas Agil Pribadi meneliti mengenai representasi karikatur yang terdapat pada *Harian Kompas*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah meneliti representasi melalui karikatur pada sampul majalah.

Selain penelitian terdahulu milik Dimas Agil Pribadi, peneliti juga menggunakan penelitian milik Yikki Artania asal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah sebagai referensi. Penelitian milik Yikki Artania berjudul *Kontruksi Makna Tokoh Politik melalui Kartun Opini* dengan unit analisis merupakan karikatur Megawati dalam buku presiden ke presiden. Pada penelitian ini, Yikki meneliti bagaimana pada buku tersebut mengisahkan perjalanan Megawati sebagai Presiden wanita pertama di Indonesia. Lika-liku dalam setiap kebijakan

dan perjalanan Megawati dijadikan sebagai unit analisis dalam penelitian milik Yikki.

Penelitian milik Yikki Artania ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Penelitian Yikki Artania ini memfokuskan pada kejadian demi kejadian atau serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yikki Artania menganalisa simbol-simbol dan teks pada karikatur terhadap setiap peristiwa atau kebijakan yang diambil. Karikatur yang menggambarkan kesalahan presiden hingga dinamika politik tersaji dalam buku *Dari Presiden ke Presiden*. Karikatur seperti Megawati Soekarno Putri yang kehilangan dua pulau, Sinpandan dan Linggitan hingga himpitan Megawati Soekarno Putri dalam menentukan kabinet menjadi salah satu contoh dari beberapa gambar karikatur yang dianalisis,

Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti milik Yikki Artania terletak pada objek penelitian. Jika pada penelitian milik Yikki Artania menganalisis representasi pada karikatur buku serial *Dari Presiden ke Presiden*, maka penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan objek karikatur pada sampul majalah.

Sedangkan untuk penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji representasi karikatur yang terdapat pada sampul Majalah *Detik* dan Majalah *Tempo* dengan menggunakan analisis semiotika dan representasi. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin membuktikan secara ilmiah bahwa karikatur merupakan salah satu sarana untuk kritik sosial terhadap suatu kejadian, dan dalam penelitian ini

menyangkut korupsi penyelenggaraan dana ibadah haji yang dilakukan oleh Menteri Agama, Suryadharma Ali.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Dimas Agil Pribadi / Universitas Pembangunan Nasional	Yikki Arstania / Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
	Universitas		
1	Tahun Penelitian	2011	2011
2	Judul Penelitian	Pemaknaan Karikatur pada Surat Kabar <i>Kompas</i> (Studi Semiotika Pemaknaan Karikatur Gayus Holomoan Tambunan Edisi Rabu , 12 Januari 2011)	Kontruksi Makna Tokoh Politik Melalui Kartu Opini (Analisis Semiotika Karikatur Megawati Dalam <i>Buku Dari Presiden ke Presiden</i> )
3	Permasalahan Penelitian	Bagaimana pemaknaan karikatur pada surat kabar <i>Kompas</i> edisi Rabu 12 Januari 2011	Bagaimana representasi makna karikatur yang terdapat dalam buku dari presiden ke presiden ? Apa saja tanda -tanda atau simbol dalam karikatur Megawati dalam <i>Buku Presiden ke Presiden</i> ? Bagaimana hasil analisis peneliti terhadap tanda-tanda pada karikatur Megawati dalam <i>Buku dari Presiden ke Presiden</i> ?

4	Tujuan Penelitian	Mengetahui bagaimana makna yang dikomunikasikan karikatur pada Surat Kabar <i>Kompas</i> Edisi Rabu 12 Januari 2011 dengan menggunakan pendekatan semiotika	Untuk mengetahui representasi makna karikatur yang terdapat dalam buku dari presiden ke presiden, Untuk mengetahui tanda-tanda atau simbol dalam karikatur Megawati dalam buku presiden ke presiden, Untuk mengetahui unit analisis peneliti terhadap tanda-tanda pada karikatur Megawati dalam buku dari presiden ke presiden
5	Teori dan Konsep yang digunakan	Teori Semiotika Peirce dan Konsep Pemaknaan	Teori Semiotika Peirce dan Konsep Pemaknaan
6	Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif
7	Hasil Penelitian	Menekankan bahwa Koran sekaliber <i>Kompas</i> mencoba menginterpretasikan pengisahan kasus mafia pajak melalui karikatur dimana terdapat makna terselubung dari simbol atau tanda yang ada pada karikatur tersebut	Menekankan bahwa Buku <i>Dari Presiden ke Presiden</i> memiliki cara untuk menyampaikan isi atau pesan melalui simbol maupun tanda dalam karikturnya. Dalam hal ini mantan presiden kelima Indonesia sekaligus presiden pertama wanita di Indonesia, Megawati Soekarno Putri
8	Perbedaan	Perbedaan terletak pada media massa yang dianalisis, jika pada penelitian terdahulu ini meneliti koran, sedangkan peneliti akan meneliti majalah.	Perbedaan terletak pada objek yang dianalisis, jika pada penelitian terdahulu ini meneliti karikatur dari buku serial <i>Dari Presiden ke Presiden</i> . Peneliti menganalisa karikatur pada sampul Majalah <i>Detik</i> dan <i>Tempo</i> .

## 2.2 Teori dan Konsep yang digunakan

### 2.2.1 Media Massa

Menurut Nurudin (2007: 54) media massa adalah sarana yang membawa pesan atau merupakan agen pembaharuan yang dapat membentuk masa depan manusia melalui macam-macam media massa. Media massa itu sendiri, terdiri dari media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak terdiri dari surat kabar, buku, majalah dan lain-lain. Media massa elektronik terdiri dari televisi, radio, film, internet, dan lain-lain. Media cetak seperti majalah, surat kabar dan buku, justru mampu memberi pemahaman yang tinggi kepada para pembacanya, karena ia sarat dengan analisis yang lebih dalam dibanding media lainnya (Cangara, 2005: 128).

Sebagai bagian dari massa atau khalayak yang menerima adanya proses penyampaian pesan dari suatu media, studi yang dilakukan peneliti ini adalah salah satu upaya peneliti untuk memberikan proses penilaian dan pemaknaan atas hadirnya karya-karya yang ditujukan bagi proses pembentukan pengetahuan.

Saat ini media massa lebih menyentuh persoalan - persoalan yang terjadi di masyarakat secara aktual, seperti harus lebih spesifik dan proporsional dalam melihat sebuah persoalan sehingga mampu menjadi media edukasi dan informasi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Sebagai lembaga edukasi, media massa harus dapat

memilah kepentingan pencerahan dengan kepentingan media massa sebagai lembaga produksi sehingga kasus - kasus pengaburan berita tidak harus terjadi dan merugikan masyarakat.

### **2.2.2 Majalah**

Sebagai bagian dari media massa, majalah merupakan salah satu produk yang masih bertahan hingga saat ini. Majalah dapat pula memiliki kemampuan membawa pesan yang sangat spesifik untuk keperluan studi, pengetahuan, hobi atau hiburan dengan penyajian mendalam yang sangat jarang ditemukan pada media lain. Pesan-pesan yang terdapat pada majalah dibentuk melalui proses interpretasi atau berupa fenomena yang terjadi (River & Jensen, 2003: 212).

Berkembangnya majalah dengan kategori yang khusus dan lebih spesifik tidak menyebabkan majalah lepas dari fungsinya (Effendy: 2002).

1. Fungsi menyiarkan informasi dalam majalah adalah alasan orang berlangganan majalah atau membeli untuk mendapatkan berita dan informasi yang pembaca butuhkan.
2. Fungsi mendidik. Sebagai sarana pendidikan, majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak bertambah pengetahuannya.



3. Fungsi menghibur dalam majalah adalah untuk mengimbangi berita-berita hardnews.
4. Hal ini semata-mata untuk melepaskan pemikiran.

Majalah juga memiliki ciri yang berbeda dengan media cetak lainnya. Berikut adalah karakteristik dan ciri-ciri majalah secara umum menurut Ardianto (2005: 113).

1. Penyajian lebih dalam. Hal ini dikarenakan wartawan yang bekerja di majalah lebih memiliki waktu yang lebih panjang dalam mengobservasi dan mencari data-data yang nantinya akan diturunkan menjadi sebuah berita.
2. Nilai aktualisasinya lebih lama. Apabila nilai aktualisasi surat kabar hanya berumur satu hari, maka nilai aktualisasi majalah dapat berumur satu minggu.
3. Gambar dan foto lebih banyak. Dengan data yang lebih lengkap dibanding dengan surat kabar, majalah memiliki kelebihan dalam menampilkan foto yang lebih banyak dengan kertas yang lebih baik serta gambar yang lebih besar.
4. Sampul sebagai daya tarik. Sampul majalah biasanya lebih menarik, selain memiliki waktu yang lebih lama dalam membuat layout sampul, kertas yang digunakan untuk menjadikan sampul pasti lebih baik dan juga dengan warna-warna yang menarik perhatian pembaca.

Jika dianalogikan, sampul ibarat pakaian dan aksesoris pada diri manusia. Sampul majalah biasanya menggunakan gambar dan warna yang menarik. Menarik tidaknya sampul suatu majalah sangat bergantung pada tipe majalah serta konsistensi keajegan majalah tersebut dalam menampilkan ciri khasnya (Ardianto, 2004: 113-114).

Menurut Baehr dan Gray (1997: 100), fungsi dan sampul majalah adalah untuk membantu apa yang dibangun majalah tersebut dengan melekatkan definisi awal melalui judul majalah, berita utama, dan foto. Kalimat, penekanan, warna hingga gambar visual dari kecantikan yang ideal dan keberhasilan, gambaran tersembunyi dari karya yang dinikmati hingga pada posisi pada isi sebuah majalah. Dalam hal ini, menurut Baehr dan Gray, pembaca tidak harus melihat sebuah isi majalah dari sampulnya, tapi model intepretasi yang diberikan adalah bagian dari simbol yang ada pada sampul yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Sampul majalah menjalankan peran sebagai pengenalan aliran, sistem tanda dan kerangka untuk meraih hasil.

### **2.2.3 Kartun dan Karikatur**

Secara estimologis, karikatur berasal dari bahasa Italia, *carricare* artinya melebih-lebihkan. Menurut Lukam dalam Sumadira (2005: 8) perkataan karikatur mulai digunakan pertama kalinya oleh orang

yang berasal dari Perancis yang bernama Mossini. Hingga pada akhirnya berkembang pesat di Perancis pada tahun 1646 hingga saat ini. Dalam *Encyclopedia of the Art* menjelaskan bahwa karikatur merupakan representasi sikap atau karakter seseorang dengan cara melebih-lebihkan sehingga melahir sebuah keunikan atau kelucuan. Karikatur bukanlah gambar biasa yang berposisi statis, atau merefleksikan sama persis obyek yang digambar.

Karikatur sebagai kartun editorial menurut Jaya Suprana merupakan karya visualisasi tajuk rencana yang mencerminkan nuansa zaman yang tidak kalah fasih berkomunikasi daripada ungkapan bahasa verbal. Ia dapat menyentuh tanpa menyakiti, mengkritik tanpa menghina, tertawa tanpa menertawakan, dan jenaka tanpa melecehkan (Setiawan, 2002: 8). Selain itu, menurut G.M Sudarta gambar karikatur adalah gambar lelucon yang membawa pesan kritik sosial sebagaimana kita lihat disetiap ruang opini surat kabar (Sobur, 2003: 138).

Istilah kartun dan karikatur sering kita dengar, bahkan tak sedikit yang mengartikan sama. Sampai sekarang batasan kartun dan karikatur masih tumpang tindih. Perbedaan kartun dan karikatur terletak pada kadar kritiknya. Karikatur adalah kartun yang menampilkan sosok masyarakat, figur, tokoh politik, ataupun artis, dan sebagainya secara eksplisit dengan bentuk yang sudah terdeformasi, tetapi tetap menampilkan ciri khas atau identik dengan

tokoh yang dikarikaturkan. Secara teknis jurnalistik, karikatur diopiniikan sebagai opini redaksi media dalam bentuk gambar yang sarat dengan muatan kritik sosial dengan memasukkan unsur kelucuan, anekdot, atau humor agar siapapun yang melihatnya bisa tersenyum, termasuk tokoh atau objek yang dikarikaturkan itu sendiri (Sumadiria, 2004:3).

### **2.2.3.1 Karikatur sebagai Kritik Sosial**

Dalam bukunya yang berjudul *Menakar Panji Koming*. Muhammad Natshir Setiawan mencoba menjelaskan pengertian mengenai kartun dan karikatur. Dalam bukunya tersebut, Natshir menjelaskan bahwa arti karikatur sebenarnya adalah potret wajah yang diberi muatan lebih sehingga anatomi tersebut terkesan *distorsif* karena mengalami deformasi bentuk, namun bila dilihat secara visual masih dapat dikenali objeknya (Setiawan, 2002: 46).

Jika mengacu pada sejarah, maka gambar-gambar yang memiliki tipe karikatur sejatinya sudah ada sejak jaman dahulu. Hal ini terjadi dimana pada jaman purbakala sudah ada goretan-goretan karikatural pada tembok-tembok gua yang menyampaikan pesan tertentu. Menurut Natshir, para seniman mesir kuno telah membuat gambar-gambar karikatur pada papyrus dan dinding-dinding piramid.

Mereka menggambarkan personifikasi dewa-dewa dengan bentuk manusia setengah hewan. Bentuk-bentuk karikatur juga ditemukan di Yunani, dimana orang-orang Yunani sering mengejek dewa-dewa mereka dengan sindiran efektif sebagai bentuk alat melawan otoritas (Setiawan, 2002: 46).

Hal senada diungkapkan oleh Sutarno yang dikutip oleh Setiawan bahwa karikatur sebagai karya jurnalistik non-verbal, karikatur cukup efektif dan mengena balik dalam menyampaikan pesan maupun kritik sosial. Di dalam karikatur dapat ditemukan unsur-unsur kecerdasan, ketajaman, dan ketetapan berpikir kritis dan ekspresif sebagai bentuk reaksi terhadap fenomena permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat luas (Setiawan, 2002: 50).

Karikatur sebagai wahana penyampai kritik sosial seringkali kita temui didalam berbagai media massa baik media cetak maupun media elektronik. Di dalam media ini, karikatur menjadi pelengkap artikel dan opini. Keberadaannya biasanya disajikan sebagai selingan atau dapat dikatakan sebagai penyejuk setelah para pembaca menikmati artikel - artikel yang lebih serius dengan sederetan huruf yang cukup melelahkan mata dan pikiran. Meskipun sebenarnya pesan - pesan yang disampaikan

dalam sebuah karikatur sama seriusnya dengan pesan - pesan yang disampaikan lewat berita dan artikel, namun pesan - pesan dalam karikatur lebih mudah dicerna karena sifatnya yang menghibur. Seringkali gambar itu terkesan lucu dan menggelikan sehingga membuat kritikan yang disampaikan oleh karikatur tidak begitu dirasakan melecehkan atau mempermalukan (Indarto, 1999: 5).

Kesengajaan dalam membentuk sebuah pesan menggunakan bahasa simbol atau non verbal ini juga bukanlah tanpa maksud, penggunaan bentuk non verbal dalam karikatur lebih diarahkan kepada pengembangan interpretasi oleh pembaca secara kreatif, sebagai respon terhadap apa yang yang diungkapkan melalui karikatur tersebut. Dengan kata lain, meskipun dalam suatu karya karikatur terdapat ide dan pandangan - pandangan seorang karikaturis, namun melalui suatu proses interpretasi muatan makna yang terkandung didalamnya akan dapat berkembang secara dinamis, sehingga dapat menjadi lebih kaya serta lebih dalam pemaknaannya.

Memahami makna karikatur sama rumitnya dengan membongkar makna sosial dibalik tindakan manusia, atau menginterpretasikan maksud dari karikatur sama dengan menafsirkan tindakan sosial. Menurut Heru Nugroho dalam

Indarto (1999:1), bahwa dibalik tindakan manusia ada makna yang harus ditangkap dan dipahami, sebab manusia melakukan interaksi sosial melalui saling memahami makna dari masing - masing tindakan.

#### **2.2.4 Semiotika**

Penggunaan tanda selalu menghiasi kehidupan sehari-hari manusia. Ketika sedang mengendarai kendaraan, menonton TV atau bahkan berkomunikasi, seseorang pasti akan menemukan atau bahkan menggunakan tanda. Ilmu yang mempelajari tentang tanda itulah yang disebut dengan semiotika.

Sobur (2009: 87) menjelaskan bahwa semiotik sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial yang memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan tanda. Menurut Littlejohn dalam Sobur (2003: 15), tanda-tanda adalah basis dari seluruh komunikasi. Manusia berkomunikasi dengan sesamanya dengan perantara tanda-tanda. Bahkan Cassier dalam Wibowo (2006: 9) menyatakan bahwa manusia lebih dari sekedar *Homo Sapiens* (Makhluk yang bisa berpikir). Manusia adalah animal symbolicum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol dalam kegiatannya.

Menurut Wibowo (2006: 7), tanda memiliki arti sebagai sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain berdasarkan konvensi yang

telah dibangun sebelumnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa dalam suatu tanda memiliki makna tersembunyi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Sejatinya, kata kunci pada semiotika adalah tanda. Ada dua pendapat besar dalam bidang semiotika, yaitu pandangan strukturalis dan pandangan pragmatis (Hoed, 2011: 3).

Pendapat pertama dari para strukturalis dipelopori oleh Ferdinand de Saussure yang memandang tanda sebagai pertemuan antara bentuk yang dikognisi seseorang, diistilahkan sebagai penanda dan makna yang merupakan isi yang dipahami dengan menggunakan tanda dan kemudian diistilahkan sebagai petanda. Hubungan antara bentuk dan makna bersifat sosial, yaitu berdasarkan konvensi atau kesepakatan. Karena mengaitkan dua segi yakni penanda dan petanda, maka teori ini bersifat dikotomis (Hoed, 2011: 3).

Sementara itu, para pragmatis yang dipelopori oleh Charles Sanders Peire memandang tanda sebagai sesuatu yang mewakili sesuatu. “Sesuatu” yang pertama inilah yang dapat ditangkap dengan menggunakan panca indera, diistilahkan sebagai representamen atau tanda. Sedangkan pada “sesuatu” yang kedua, lebih diistilahkan sebagai objek. Proses hubungan antara representamen ke objek disebut semiosis. Proses Semiosis ini belum lengkap tanpa suatu proses lanjutan yang disebut interpretant atau proses penafsiran. Hubungan tiga segi ini (representamen, objek, dan interpretan) dalam



proses semiosis ini membuat teori ini memiliki sifat trikotomis (Hoed, 2011: 4).

Namun, karena sifatnya dinamis, Peirce beranggapan bahwa proses semiosis tidak terjadi hanya satu kali, dan dapat berlanjut secara tak terhingga atau tak terbatas (*unlimited semiosis*). Hal ini yang membuat interpretan dapat berubah menjadi representamen (Hoed, 2011: 157).

Contohnya adalah keputan asap di kejauhan mewakili kebakaran. Asap sebagai representamen (R) dan kebakaran sebagai objek (O) dalam kognisi manusia, kemudian, interpretan dapat merujuk pada lokasi kebakaran di daerah X (Hoed, 2011: 156).

Namun, semiosis tidak hanya terjadi sekali. Berdasarkan contoh di atas, keputan asap dari kejauhan (R1) merujuk pada “peristiwa kebakaran” (O), dan mengalami proses interpretan “asap kebakaran pada gedung pertokoan A” tidak berakhir sampai disini. Interpretan yang menghasilkan “gedung pertokoan A yang terbakar dapat memiliki representamen baru (R2) yang merujuk pada “kerugian yang diderita pemilik” (O2), dan menghasilkan proses interpretan baru (I2) yaitu “kerugian pada bank kreditur”. Begitu prosesnya dan terus berjalan (R3) dan secara teoritis tidak ada habisnya, karena sifat manusia yang terus berpikir (Hoed, 2011: 157).

Berdasarkan kedua teori yang dijelaskan tadi, penelitian ini akan menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce sebagai

analisis utama. Hal ini dikarenakan, karikatur merupakan medium visual yang kontennya tersusun secara ikonis dan simbolis sehingga model semiotika Peirce dengan teknik segitiganya dapat mempermudah dalam menganalisis tanda-tanda pada gambar.

### **2.2.5 Representasi**

Menurut Stuart Hall (1997: 17), representasi ialah sebuah proses produksi makna dari konsep yang ada dalam pemikiran manusia melalui bahasa. Representasi merupakan jembatan antara konsep dan bahasa yang memungkinkan kita untuk mengacu pada suatu objek yang real atau imajinasi.

Lebih lanjut lagi, Eriyanto (2009: 113) menjabarkan bahwa representasi sendiri menunjuk kepada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam suatu pemberitaan. Representasi ini menjadi penting karena merujuk pada pernyataan tentang apakah orang, kelompok tersebut telah digambarkan sebagaimana mestinya.

Dalam representasi terdapat dua hal penting didalamnya. Pertama adalah adanya sebuah sistem di dalam representasi yang terdiri dari objek, orang dan peristiwa yang dikorelasikan dengan suatu konsep. Tanpa adanya hal itu, maka kita tidak bisa menginterpretasikan makna yang ada. Hal yang kedua adalah bahasa, dalam proses pengkonstruksian makna kita membutuhkan

bahasa yang umum, sehingga dapat menghubungkan konsep dan ide kita dengan perkataan, ucapan, suara ataupun gambar. Objek-objek yang memiliki makna ini nantinya akan disebut sebagai tanda (Hall, 1997: 17).

Selain terdapat dua hal penting, Hall (1997: 15) juga menambahkan bahwa terdapat tiga pendekatan untuk menjelaskan bagaimana bahasa merepresentasikan sesuatu. Ketiga pendekatan tersebut adalah *the reflective*, *The intentional*, dan *the constructionist to representation*. Pada pendekatan reflektif, yakni makna terletak pada objek, orang, ide atau peristiwa yang ada di dunia nyata, dan bahasa yang berfungsi sebagai kaca yang merefleksikan makna sesungguhnya yang sudah ada di dunia.

Pada pendekatan kedua, pendekatan intensional, yakni bagaimana komunikator, penulis yang memaksakan makna uniknya ke komunikasi melalui bahasa. Bahasa atau kata-kata yang digunakan memiliki makna sesuai dengan yang diinginkan penulis. Terakhir, pendekatan konstruksionis, yakni pendekatan yang memandang bahwa terdapat aktor sosial yang menggunakan sistem konseptual budaya mereka dan sistem representasi linguistik dan lainnya untuk mengkonstruksi makna, membuat dunia menjadi bermakna dan berkomunikasi tentang dunia bermakna kepada orang lain.

Pada teori semiotika, proses perekaman gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik disebut representasi. Menurut Danesi (2010:

23), representasi bisa juga dimaknai sebagai penggunaan tanda-tanda untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik.

Lebih lanjut lagi Danesi (2010: 3) menjelaskan dalam fungsi XY, dimana X sebagai proses membangun bentuk dengan rangka mengarahkan perhatian ke sesuatu, Y. Meskipun demikian, penggambaran konsep Y sebagai representasi dari konsep X bukan suatu hal yang mudah. Maksud dari pembuat bentuk, konteks, historis, dan sosial terkait dengan terbuatnya bentuk ini, tujuan pembuatannya, dan hal lainnya merupakan faktor-faktor kompleks yang berpengaruh dalam memasuki gambaran tersebut.

Selain itu, Danesi (2010: 4) memudahkan konsep X dan Y dengan menyatakan bahwa bentuk fisik sebuah representasi, yaitu X, pada umumnya sebagai penanda, dan makna yang dibangkitkannya, yaitu Y, pada umumnya dinamakan petanda; dan makna yang secara potensial bisa diambil dari representasi ini ( $X=Y$ ) dalam sebuah lingkungan budaya tertentu atau bisa juga disebut proses pemaknaan, disebut sebagai signifikasi (sistem penandaan).

### **2.2.6 Media dan Korupsi Politik**

Media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melewati media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi

yang sama itu dapat diterima secara serentak dan sesaat (Mulyana, 2008: 17).

Secara umum, media massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Hal ini seperti dirumuskan dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu fungsi pers nasional adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Peranan pers atau juga media massa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa pers Nasional akan melaksanakan peranan sebagai berikut: Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong mewujudkan supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum yang berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan juga saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

*“ Korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan Indonesia “*

Demikianlah pernyataan dari salah satu tokoh bangsa negeri ini, Anies Baswedan dalam Buku Korupsi Mengorupsi Indonesia. Dalam sejarahnya, korupsi bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia.

Korupsi lahir berbarengan dengan umur manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, di sanalah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan alat suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk saling menguasai dan berebut (Wijayanto, 2009: 3).

Menurut badan anti korupsi dunia, Transparency International (TI), korupsi merupakan suatu penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi (Wijayanto, 2009: 7).

Berdasarkan perspektif hukum di Indonesia, definisi korupsi sudah tercantum pada UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 yang dijelaskan dalam 13 buah pasal. Dari semua pasal tersebut, sebanyak 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi berhasil dirumuskan dan dikelompok menjadi, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Korupsi politik sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi politik menimbulkan implikasi yang luas dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Pada gilirannya krisis multidimensi ini mengundang konsekuensi krisis kewibawaan kekuasaan politik, sehingga menimbulkan demonstrasi, kritik, gerakan anti pemerintah, dan revolusi sosial atau *chaos*. Krisis multidimensi di berbagai negara termasuk di Indonesia, acap kali

dikarenakan adanya kasus korupsi. Dalam bukunya yang berjudul “*Korupsi Mengorupsi Indonesia*”, Wijayanto selaku penulis menjelaskan bahwa korupsi politik suatu negara menjadi faktor determinan timbulnya krisis kehidupan dan penghidupan rakyat.

Jika mengacu pada penjelasan umum Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai kontrol sosial maka, pers atau media massa juga melaksanakan kontrol sosial sebagai hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun akan penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Berdasarkan perumusan fungsi pers atau media massa dalam Undang-Undang Pers di atas dapat diketahui bahwa fungsi dari pers atau media massa adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dalam kaitan hubungannya dengan pemanfaatan media massa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, maka fungsi media massa di sini terutama sebagai media informasi dan kontrol sosial.

### **2.2.7 Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia pertama kali terselenggara pada tahun 1948. Pada tahun itulah bendera Merah-Putih resmi dikibarkan untuk pertama kalinya di Arafah. Berdasarkan data yang didapat dari kemenag.go.id pada tahun 2010, jumlah jamaah haji yang diberangkatkan untuk pertama kali (tahun

1948) berjumlah 9.892 orang dan mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Seperti yang tercantum dalam website *kemenag.go.id* yang diposting tahun 2010, setelah 54 tahun penyelenggaraan ibadah haji, baru pada tahun 1999 pertama kali diterbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pijakan yang kuat dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Sejak keluarnya UU No. 17 tersebut, penyelenggaraan haji Indonesia bersandar pada ketentuan perundang-undangan ini. Sedangkan pelaksanaan haji di Arab Saudi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut sebagaimana tercantum dalam ‘*Taklimatul Hajj*’ yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan haji, seperti pemondokan, transportasi, dan ketentuan teknis pelaksanaan ibadah seperti jadwal waktu pelemparan jumrah dan transportasi jamaah haji untuk Arafah- Muzdalifah- Mina dengan sistem *taraddudi*.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 1999, negara mengakui bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5 yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi kriteria ‘*istitha*’ah berupa kemampuan materi, fisik dan mental. Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional. Dengan UU ini, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat sebagai pelaku langsung yang berhak dan berkewajiban memberikan pelayanan operasional ibadah haji. Pelayanan ini dimaksudkan untuk



menjamin kesejahteraan lahir-bathin jamaah haji serta memelihara nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri

Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa pemerintah wajib memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap jamaah haji melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri, sehingga diperoleh haji mabrur

Penyelenggaraan haji sejatinya menjadi tanggung jawab penuh untuk Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari-harinya secara struktural dan teknis fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (BIUH). Ditjen BIUH dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1979 (merupakan penggabungan dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Ditjen Urusan Haji), yang memiliki dua unit teknis yaitu Direktorat Penyelenggaraan Urusan Haji dan Direktorat Pembinaan Urusan Haji.

Ditjen BIUH merupakan pelaksana teknis penyelenggaraan haji untuk tingkat Pusat, yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sebagian tugas pokok Departemen Agama di bidang bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji serta menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis

bimbingan masyarakat, penerangan dan urusan haji. Dengan kata lain, unit teknis yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab (*leading sector*) dalam penyelenggaraan haji dan telah mendapat delegasi wewenang dalam hal fungsi perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis penyelenggaraan haji diberikan kepada satuan unit kerja Ditgara Haji dan Ditbina Haji. Untuk pelaksanaan koordinasi di daerah dan di Arab Saudi maka masing-masing daerah tersebut ditetapkan struktur penyelenggaraan haji sebagai berikut:

- Pertama, koordinator penyelenggaraan ibadah haji Provinsi adalah gubernur dan pelaksanaan sehari-hari oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Depag selaku Kastaf;
- Kedua, koordinator penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten/kota, adalah bupati/walikota dan pelaksanaan sehari-hari dijalankan oleh Kakandepag Kabupaten/kota;
- Ketiga, koordinator penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi adalah Kepala Perwakilan RI dibantu oleh Konsul Jenderal RI Jeddah sebagai koordinator harian. Sedangkan pelaksanaan sehari-hari dijalankan oleh Kepala Bidang Urusan Haji pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah.

Organisasi terkecil dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah kelompok terbang (kloter), yaitu sekelompok jamaah haji yang jumlahnya sesuai dengan jenis dan kapasitas pesawat yang

digunakan. Dalam setiap kloter ditunjuk petugas operasional yang menyertai jamaah haji sejak di asrama haji, di Arab Saudi sampai kembali ke tanah air yang terdiri dari unsur pemandu haji (TPIHI) yang juga berfungsi sebagai ketua kelompok terbang, pembimbing ibadah (TPIH), kesehatan (TKHI), ketua rombongan yang membawahi empat regu dan ketua regu yang membawahi sepuluh orang jamaah haji. Pada masa operasional haji, meliputi masa pemberangkatan jamaah haji dari asrama embarkasi ke Arab Saudi sampai dengan pemulangan haji dari Jeddah dan kedatangannya di embarkasi asal, dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang berfungsi sebagai pelaksana operasional yang melibatkan instansi terkait terdiri dari PPIH Pusat, PPIH embarkasi dan PPIH Arab Saudi. Pengendalian penyelenggaraan haji di tanah air dan di Arab Saudi dilakukan oleh Menteri Agama sedangkan teknis pengendalian operasional haji dilakukan oleh PPIH di tingkat Pusat, sedangkan pelaksanaan operasional di daerah disesuaikan dengan ruang lingkup daerah tugasnya.

### **2.2.7.1 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**

Berdasarkan situs Kementerian Agama Republik Indonesia, penetapan BPIH dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI, yang selanjutnya digunakan untuk keperluan penyelenggaraan

ibadah haji. Dengan kata lain penyusunan BPIH dilakukan secara konsultatif antara Pemerintah dengan DPR RI. Secara garis besar mekanisme penyampaian rencana penentuan BPIH dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, merumuskan konsep rincian pengeluaran selama operasional haji berdasarkan biaya tahun-tahun sebelumnya, baik pembiayaan operasional di tanah air maupun operasional haji di Arab Saudi.
2. Bahan tersebut kemudian dipaparkan dalam rapat terbatas yang biasanya dilakukan sebanyak 5 sampai 6 kali yang dihadiri oleh unsur internal Departemen Agama. Rapat tersebut melibatkan unsur terkait dari Direktorat dan Pihak Itjen.
3. Hasil rapat tersebut dipresentasikan dalam rapat yang lebih luas dan melibatkan unsur-unsur bank bersama Bank Indonesia, Departemen Perhubungan dan penerbangan, Departemen Kesehatan, dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Selanjutnya dibentuk Tim Kecil untuk mengkaji secara mendalam sehingga menghasilkan draft final BPIH.
4. Draft BPIH kemudian diusulkan kepada DPR yang kemudian dibahas oleh Komisi VI DPR-RI bersama

Pemerintah dan berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan tahap Rapat Kerja (RK).

5. Hasil pembahasan Pemerintah bersama DPR tersebut kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai BPIH.

Namun, menurut data *Indonesian Corruption Watch* dalam artikel Majalah Tempo menyatakan bahwa suatu acara yang bersifat ibadah ini ternyata memiliki potensi bisnis besar didalamnya. ICW mengungkapkan setiap tahunnya total uang dalam penyelenggaraan ibadah haji mencapai Rp. 9,07 triliun. Dana sebesar itu sayangnya tidak dibarengi dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Padahal, berdasarkan sistem yang berlaku sekarang, Depag diberi kekuasaan memonopoli penyelenggaraan haji di Indonesia.

Lebih rincinya, dalam situs resmi ICW menyebutkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji atau yang disebut BPIH menjadi salah satu titik penyalahgunaan. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih tinggi dan masih ada biaya tak langsung atau pungutan di luar BPIH. Biaya yang tinggi ini karena pemerintah tidak membuka secara luas peran swasta untuk aktif menentukan biaya haji tersebut, sehingga mengakibatkan adanya monopoli dalam setiap

pemenuhan item-item keperluan haji mulai dari pengadaan barang, pesawat maupun makanan (catering).

Indonesia merupakan negara pengirim jamaah haji terbesar di Indonesia. Menurut data publikasi kemenag melalui situsnya, total jamaah haji yang berangkat tahun 2013 mencapai 168.800 orang, dengan rincian haji reguler sebanyak 155.200 orang dan haji khusus sebanyak 13.600 orang. Dengan besarnya angka tersebut, dapat dikatakan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap ibadah haji, sangatlah besar. Padahal, biaya yang diperlukan untuk berangkat haji tidaklah murah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1434H/2013M, rata-rata biaya haji di Indonesia adalah USD 3.527 atau senilai Rp. 35.27.000,- dihitung dengan asumsi nilai tukar dolar terhadap rupiah sebesar Rp.10.000,-.

### **2.2.8 Kerangka Pemikiran**

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam meneliti kasus korupsi dana ibadah haji.

## Bagan 2.1

### Kerangka Pemikiran

